



Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran XXIV

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada periode 2025–2045, arah pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Arah pembangunan jangka panjang tersebut kemudian dijabarkan dalam RPJMN 2025–2029 serta Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun program kerja tahunan.

Dalam kerangka RPJPN 2025–2045, pembangunan ekonomi nasional bertumpu pada transformasi ekonomi, salah satu dari tiga misi besar transformasi pembangunan. Transformasi ekonomi menekankan pentingnya penguatan sektor produktif, peningkatan nilai tambah, dan pemerataan pertumbuhan yang inklusif melalui pemberdayaan pelaku usaha rakyat, termasuk koperasi dan UMKM. RPJMN 2025–2029 menekankan bahwa koperasi dan UMKM merupakan pilar utama dalam mendorong produktivitas nasional, industrialisasi sektor riil, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok ekonomi.

Dalam konteks tersebut, kebijakan nasional secara tegas mengarahkan penguatan peran koperasi dan UMKM melalui dua pendekatan: (1) keberpihakan (*affirmative*), dan (2) pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan melalui penyediaan akses pembiayaan, dukungan teknologi, peningkatan kapasitas, dan perlindungan bagi usaha mikro dan koperasi yang berada di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu, pendekatan kemandirian diarahkan untuk memperkuat daya saing melalui inovasi, digitalisasi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan skala ekonomi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kota Salatiga Tahun 2027 adalah dokumen hasil perencanaan Dinkop UKM yang berisi uraian rinci berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Penyusunan rencana kerja 2027 didesain untuk mendukung

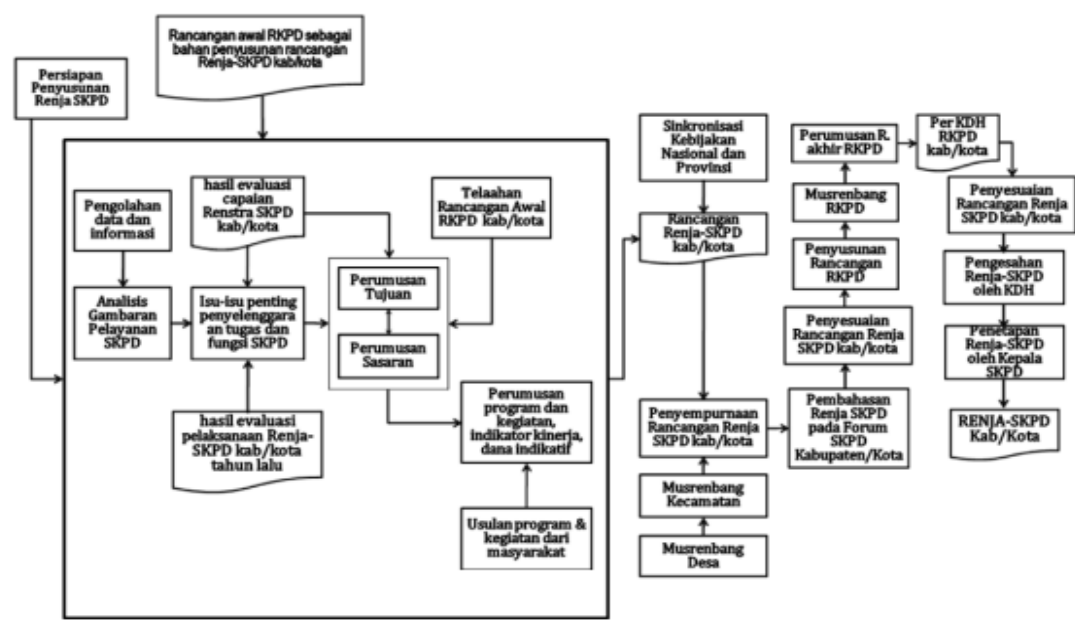
prioritas pembangunan Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan Daya Saing. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah hendak berkolaborasi dengan unsur-unsur lain untuk menciptakan dan memperkuat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi yang berbasis kerakyatan, yang merupakan gambaran dari koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kota Salatiga tahun 2025-2029, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga tahun 2025-2029.

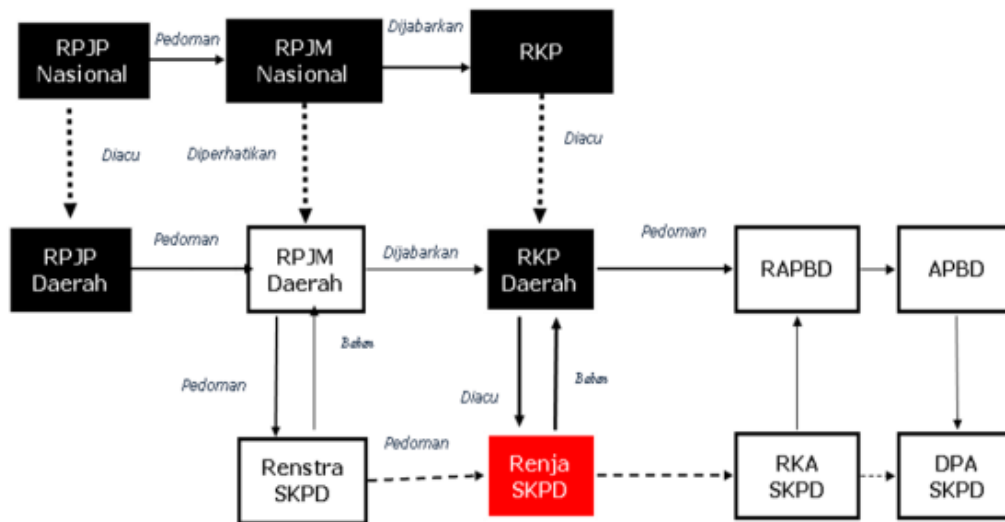
Penyusunan Renja Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/ nasional/ regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam Renja Tahun 2027. Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2027 juga mempedomani arah kebijakan pembangunan dari program Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029, Renstra Dinkop UKM Tahun 2025-2029, Ranwal Renja Dinkop UKM 2027, Program Strategis Nasional, RKPD Kota Salatiga Tahun 2027. Berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Visi Presiden **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”** dan juga mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan Pembangunan **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan”**. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2027 diarahkan pada tahap **“Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah”** dengan tema **“Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulung Punggung Pertumbuhan Ekonomi”**.

Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah pada tahap **“Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrasrtuktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup”** diarahkan pada **“Pengembangan Kepariwisata dan Ekosistem Ekonomi Kreatif didukung dengan SDM Unggul”**. Yang difokuskan pada meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah; mengembangkan komunitas pembelajaran Bahasa dan ketrampilan komunikasi Internasional; meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada Pendidikan kesetaraan dan Lembaga ketrampilan; meningkatkan kualitas SDM dan fasilitasi kesehatan; serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

a. Bagan alir tahapan penyusunan Renja OPD



b. Keterkaitan Renja dengan dokumen lainnya dapat dilihat dari bagan berikut ini



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota salatiga;
 27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

A. Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2027 dimaksudkan untuk:

- a. Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 dan menetapkan program prioritas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis 2025-2029;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga;
- c. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- d. Menyiapkan semua faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi serta meminimalkan permasalahan yang dimiliki.

B. Tujuan:

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2027 bertujuan untuk:

- a. Memberikan landasan operasional dan pedoman Perangkat Daerah yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2027;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 1 tahun;
- c. Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dan pola pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinkop UKM Kota Salatiga 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:

1. Latar Belakang penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2027.
4. Sistematika Penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI UKM TAHUN 2025.

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi Capaian Kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Dinkop UKM Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM tahun 2023-2025.
3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 berdasarkan Renstra Dinkop UKM Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan Evaluasi Hasil Renja Dinkop UKM Tahun 2025 dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah Pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINKOP UKM

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinkop UKM Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinkop UKM Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Dinkop UKM Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Dinkop UKM Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/ berkurang dari target Renstra Dinkop UKM Tahun 2025-2029)
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Dinkop UKM Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/ daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Dinkop UKM Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
2. Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, Program Strategis Nasional (ProSN), dan hal-hal khusus lainnya (direktif pemerintah

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Dinkop UKM Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Dinkop UKM Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Dinkop UKM Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Dinkop UKM Tahun 2026

BAB VI PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH TAHUN 2025**

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Evaluasi capaian indikator kinerja Renja Tahun 2025 ditunjukkan dengan capaian indikator yang terbagi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi hasil Renja terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

- 1) Sangat Tinggi, untuk presentase capaian target akhir Renja sampai dengan tahun 2025 sebesar $91\% \leq 100\%$;
- 2) Tinggi, untuk presentase capaian target akhir Renja sampai dengan tahun 2025 sebesar $76\% \leq 90\%$;
- 3) Sedang, untuk presentase capaian target akhir Renja sampai dengan tahun 2025 sebesar capaian $66\% \leq 75\%$;
- 4) Rendah untuk presentase capaian target akhir Renja sampai dengan tahun 2025 sebesar $51\% \leq 65\%$;
- 5) Sangat rendah untuk presentase capaian target akhir Renja sampai dengan tahun 2025 sebesar $\leq 50\%$

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2025
(berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
1	Presentase koperasi yang sehat dan cukup sehat	(Jumlah koperasi yang sehat dan cukup sehat)/(Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya)	%	65,38	60,00	91,77	Sangat tinggi
2	Presentase usaha mikro dan kecil yang dibina	(Jumlah unit usaha yang dibina)/(Jumlah seluruh UMKM) x 100	%	49,8	47,11	94, 60	Sangat tinggi

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2025
(berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Capaian (%)	Kategori (%)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya, volume usaha, atau aset)/(Jumlah koperasi yang aktif) x 100	71,78	71,88	100,14	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	(Jumlah unit mikro yang menjadi wirausaha)/(Jumlah seluruh usaha mikro) x 100	100	52,95	52,95	Rendah

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Tahun 2025
(Berdasarkan RPD Kota Salatiga dan Renstra Tahun 2023-2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	70,67%
		Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96%

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Perbandingan Antar Tahun
(Berdasarkan RPD Kota Salatiga dan Renstra Tahun 2023-2026)

Indikator Sasaran	Realisasi Th 2023	Realisasi Th 2024	Target Th 2025	Realisasi Th 2025	Capaian Th 2025	Keterangan
Persentase koperasi aktif	52,57%	53,07%	70,67%	63,58	89,97%	Baik
Persentase usaha mikro dan kecil	99,93%	99,77%	99,78%	99,87%	100,09%	Sangat Baik

Tidak dapat dicapainya target koperasi aktif disebabkan beberapa faktor:

1. Beberapa koperasi mengalami likuiditas dikarenakan adanya permasalahan internal pengurus koperasi itu sendiri, kredit macet, dan koperasi bermasalah hukum;
2. Semakin banyak indikator yang harus dipenuhi oleh koperasi untuk memperoleh status koperasi aktif, yang mana indikator yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum;
 - Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
 - Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat diharapkan;
 - Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - Tidak melaporkan RAT 3 tahun berturut-turut;
 - Jangka waktu berdirinya telah berakhir;
 - Bermasalah hukum (asset dan pinjaman dengan pihak ketiga);
 - SK (Surat Keputusan) pendirian Badan Hukum belum ada;
 - Permasalahan internal koperasi seperti Perselisihan antar koperasi, pinjaman fiktif, ketidakmampuan pengurus dalam mengelola koperasi)
 - Koperasi tidak ditemukan di lapangan;
 - Data double;
 - Kesalahan input.
3. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada sebagian koperasi belum seusai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, serta belum seluruhnya melaporkan hasil pelaksanaan RAT ke Dinas sehingga terlambat penghitungan.

Upaya untuk meningkatkan persentase koperasi aktif telah dilakukan melalui 4 program pendukung, yaitu:

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan bagi koperasi
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap koperasi
3. Memberikan Peringatan pada koperasi untuk melakukan RAT
4. Selalu menghimbau pada koperasi untuk pro aktif melaporkan/Menginformasikan sudah/terlambatnya pelaksanaan RAT pada Dinas Koperasi dan UKM
5. Melaksanakan pendampingan koperasi dalam inovasi produk dan layanan serta bimtek analisa kredit pagi KSP

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase koperasi aktif adalah:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, terjadi kenaikan sebesar 0,10%. Pada 2025 target persentase usaha mikro dan kecil sebesar 99,78%, dan realisasi sebesar 99,87%. Ini berarti 0,09% di atas target. Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dibagi dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah. Capaian tahun 2025 sebesar 103,93%.

Dapat dicapainya target indikator persentase usaha mikro dan kecil dengan capaian sebesar 104,03% disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Dilakukannya pembaruan data secara berkala sehingga dapat diketahui peningkatan jumlah UKM;
2. Meningkatnya jumlah kegiatan dan event yang diselenggarakan di Kota Salatiga;
3. Bertambahnya jumlah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Kota Salatiga (UIN, UKSW, STIE AMA, AR Rum, Sekolah Tinggi Teologi) sehingga mendorong pertumbuhan UKM;
4. Meningkatnya minat masyarakat untuk membuka usaha sendiri.

Upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama dilakukan melalui program pendukung, yaitu:

1. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan kewirausahaan dan strategi pemasaran;
2. Melakukan Pembantuan pelaku usaha untuk akses kredit modal usaha/ bantuan pemerintah;
3. Memberikan bimbingan teknis untuk memulai usaha baru;
4. Menyelenggarakan Bazar, Pameran dan event UMKM;
5. Melaksanakan edukasi mengenai regulasi dan perizinan usaha.

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator Persentase usaha mikro dan kecil adalah:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)
2. Program Pengembangan UMKM

Koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di negara berkembang. Koperasi dapat berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya. Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) merupakan salah satu program prioritas

untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis kelurahan. Program ini bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang produktif.

Tingkat capaian persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat sebesar 91,77 dengan target 65,38% dan realisasi sebesar 60% termasuk kategori sangat tinggi. Koperasi di Salatiga mengalami peningkatan nilai, namun untuk mencapai standar koperasi yang sehat masih membutuhkan usaha disebabkan range penilaian untuk mencapai kategori berkualitas sangat tinggi.

Meningkatnya koperasi yang berkualitas yang dihitung dari jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya, volume usaha dan aset dibandingkan jumlah koperasi yang aktif tingkat capaiannya sebesar 100,14% dengan kategori sangat tinggi. Realisasi sebesar 71,88% melebihi target dari 71,78%. Meski beberapa koperasi mengalami permasalahan likuiditas, konflik internal pengurus, kredit macet, bermasalah dengan hukum namun Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus berupaya melakukan pembinaan dan pelatihan – pelatihan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berusaha terus melakukan pembinaan, mendorong pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha mikro dan kecil dengan berbagai macam fasilitasi dan pelatihan. Pengembangan sektor ini akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Tingkat capaian persentase usaha mikro kecil yang dibina sebesar 94,60% termasuk kategori sangat tinggi dari target 49,8 % dan realisasi sebesar 47,11%. Pembinaan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, fasilitasi sertifikasi halal dan badan hukum kelompok UMKM, fasilitasi aplikais pintar UMKM, broadcast dan konsultasi baik tatap muka maupun melalui media online.

Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah perbandingan usaha mikro yang menjadi wirausaha dibandingkan jumlah seluruh usaha mikro belum mencapai target. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain kondisi perekonomian secara nasional yang mengalami penurunan, kurangnya modal usaha, dan turunnya daya beli masyarakat.

2.2 Evaluasi Capaian SPM tahun 2023-2025.

Berdasarkan program prioritas, tujuan pembangunan dan sasaran Kota Salatiga tidak ada pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang memiliki indikator SPM.

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan rumusan permasalahan pada RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, yang dapat diintervensi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya angka kemiskinan 4,20%, sedangkan target SDGs pada tahun 2030 adalah nol persen;
2. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, termasuk 3 besar di Jawa Tengah;
3. Tingkat pengangguran terbuka masih relative cukup besar 3,67%;
4. Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang-Solo, belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini, pertumbuhan ekonomi belum mencapai target pesimis tahun 2025 yaitu 6,10%;
5. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga;
6. Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No 13 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menjadi tugas dari Dinas Koperasi, UKM, diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kualitas pengurus dan pengawas koperasi yang belum memenuhi standar kompetensi
- b. Sulitnya akses permodalan bagi koperasi, karena sulitnya memperoleh izin usaha simpan pinjam
- c. Perlunya diversifikasi usaha bagi koperasi untuk mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan daya saing.
- d. Masih terbatasnya sarana prasarana kerja dan usaha serta teknologi koperasi dan UKM.

- e. Masih terbatasnya kemampuan UKM untuk meningkatkan dan memperluas pemasaran produknya, baik karena kemampuan manajerial, permodalan, maupun sarana dan prasarana.
- f. Jumlah data UMKM yang fluktuatif, sehingga sulit untuk mendapatkan data yang pasti.

Faktor penghambat dan pendorong penyelesaian permasalahan di atas adalah:

- a. Penghambat:
 - 1. Pembinaan ke pengelola koperasi belum menyeluruh dan berkelanjutan;
 - 2. Kurangnya jangkauan pelaksanaan pelatihan di seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan;
 - 3. Ketidakseimbangan jumlah pertumbuhan usaha mikro dengan sumber daya yang ada.
- b. Pendorong :
 - 1. Tingginya animo masyarakat untuk mendirikan koperasi;
 - 2. Semakin mudahnya persyaratan pendirian koperasi;
 - 3. Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor usaha mikro;
 - 4. Semakin terbukanya jaringan kerjasama antara masyarakat dan badan usaha swasta untuk pengembangan UKM.

Isu strategis Kota Salatiga yang menjadi Isu Strategis Dinas Koperasi UKM adalah pada **“Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk”**.

2.4 Telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan Renja, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi Masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Salatiga. Berikut adalah usulan pokok-pokok pikiran berdasarkan kamus usulan dan permasalahan. Sebagai pedoman dalam

pengusulan pokok-pokok pikiran DPRD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyusun Kamus Usulan Aspirasi sebagai berikut:

1. Sertifikasi halal bagi UMKM
2. Pelatihan Bidang Koperasi dan UKM
3. Pengembangan UMKM (sosialisasi, pelatihan, seminar)

Usulan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui pokok-pokok pikiran DPRD, setelah dilakukan beberapa tahapan verifikasi baik dilakukan oleh Bappeda maupun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027
Kota Salatiga

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Salatiga	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan	16.000.000,-	Pelatihan Tata Boga
2	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/ Pelaku usaha			50.000.000,-	Pelatihan untuk peningkatan kompetensi pelaku UMKM (Pengrajin tahu tempe)
3	Program Pengembangan UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	Salatiga	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro	50.000.000,-	Pengembangan UMKM RW 14 Ledok

2.5 Usulan Masyarakat

Tidak ada usulan Masyarakat kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Forum Musrembang maupun Konsultasi publik yang dilaksanakan.

2.6 Inovasi Bidang Urusan dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Inovasi daerah merupakan Upaya sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide guna meningkatkan kualitas pelayanan public, efisiensi pemerintahan, serta daya saing ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan inovasi, Pemerintah daerah dapat menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelayanan kepada Masyarakat. Perwali nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan inovasi daerah menjadi salah satu landasan hukum dalam Upaya meningkatkan indeks inovasi. Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dalam berbagai sektor.

Tabel 2.6 Inovasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga

No	Tahun	Judul Inovasi	Uraian
1	2024-2026	Pintar UMKM	Aplikasi Pintar KUMKM Kota Salatiga merupakan sebuah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mempermudah akses menuju berbagai aplikasi yang mendukung pengelolaan koperasi dan UMKM. Portal ini menampilkan tiga aplikasi utama, yaitu Pintar UMKM, Koperasi Merah Putih, dan Koperasi Umum. Pada pintar UMKM menampilkan deskripsi singkat mengenai Pintar UMKM, rekap jumlah data UMKM, pelaku UMKM, produk unggulan dan berita terkait kegiatan atau acara yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.
2	2025	Transformer (Transformasi Ekonomi Kerakyatan)	Transformer (Transformasi Ekonomi Kerakyatan) merupakan inovasi strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui penguatan peran koperasi sebagai aggregator digital. Inisiatif ini hadir sebagai jawaban atas tantangan utama pelaku UMKM, yaitu lemahnya sinergi pelaku usaha, keterbatasan akses pasar, rendahnya daya saing dan minimnya nilai tambah produk lokal. Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor (hexahelix) yang melibatkan pemerintah daerah, Masyarakat, LSM/ Lembaga kemasyarakatan, dunia usaha (koperasi dan UMKM). Perguruan

No	Tahun	Judul Inovasi	Uraian
			Tinggi, Media Massa, serta perbankan. Kolaborasi ini bertujuan mendukung pengembangan rantai pasok lokal, peningkatan kapasitas usaha, pengemasan dan mutu produk, serta penetrasi pasar digital yang lebih luas. Transformer berhasil menciptakan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Koperasi kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai Lembaga simpan pinjam, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat konsolidasi produksi, logistik, dan pemasaran kolektif berbasis teknologi digital.
3	2026	Koperasi Sekunder	Inovasi ini dilatarbelakangi oleh amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih guna memperkuat ketahanan pangan serta ekonomi akar rumput. Di Kota Salatiga, telah berdiri 23 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), namun perkembangannya masih berjalan sendiri-sendiri secara parsial dan mengalami stagnasi akibat keterbatasan akses permodalan, minimnya inovasi, tata kelola yang belum modern, serta skala usaha yang kecil. Kondisi tersebut berimplikasi pada tingginya Harga Pokok Penjualan (HPP) akibat pengadaan barang yang dilakukan secara eceran dan mandiri. Menanggapi permasalahan ini, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga menginisiasi sebuah terobosan inovasi strategis berupa pembentukan Koperasi Sekunder Merah Putih yang diberi nama "KOMPAS" (Koperasi Sekunder Merah Putih Salatiga). Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengintegrasikan jaringan bisnis dan kelembagaan 23 KKMP ke dalam satu ekosistem ekonomi terpadu yang berfungsi sebagai agregator, konsolidator, dan pusat distribusi logistik skala besar. Proyek ini menggalang kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Salatiga, BULOG, dan KOMPAS untuk menjamin pasokan komoditas pangan murah bagi masyarakat, yang diresmikan melalui kegiatan <i>launching</i> bersama Walikota Salatiga. Selain itu, inovasi "KOMPAS" memberikan kontribusi positif bagi ekosistem pentahelix, yang meliputi penguatan program strategis pemerintah, penurunan biaya hidup masyarakat, kepastian pasar bagi dunia usaha, ruang publikasi bernilai berita bagi media, serta penyediaan data primer bagi riset akademis mengenai tata kelola koperasi modern yang berkelanjutan di Kota Salatiga

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Visi pembangunan kota Salatiga Adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam periode masa jabatannya. Visi pembangunan daerah kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 2027, yaitu:

“Terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bergerak

Kata “Bergerak” bermakna bahwa pembangunan Kota Salatiga bertujuan untuk mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, mewujudkan kota yang produktif, sejahtera, harmonis dan berkemajuan, bergeraknya pembangunan Kota Salatiga secara adil dan merata.

2. Energik

“Energik” bermakna Kota Salatiga dapat mewujudkan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam menggerakkan kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan, karakter kerja, dan mewujudkan indeks pembangunan manusia yang tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada paradigma pembangunan yang inklusif, adil dan merata dengan optimalisasi sektor potensial perdagangan dan jasa, serta didukung sektor strategis ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro dan pariwisata.

3. Dinamis

“Dinamis” bermakna untuk mewujudkan keberadaan Pemerintah Kota yang mampu mengurus dan memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumber daya pemerintahan yang dimiliki dengan terus aktif mendayagunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik serta berjalannya prinsip kolaborasi pemerintahan Pentahelix (pemerintah, Masyarakat, akademisi, swasta dan media) dalam mewujudkan pemerintahan kota

yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

4. Adaptif

“Adaptif” berwujudkan pemerintah dalam masyarakat Kota Salatiga yang selalu mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda, khususnya di Tengah arus perubahan social, lingkungan dan distrupsi teknologi. Kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif.

5. Salatiga yang mendunia

Salatiga kota “mendunia” berarti dikenal luas di seluruh dunia atau menjadi salah satu kota yang berperan dalam interaksi hubungan internasional. Salatiga kota “mendunia” juga bisa merujuk pada sikap mental, perilaku, dan cara pandang pemerintah dan warga Kota Salatiga yang mencerminkan semakin luasnya pergaulan dan persaingan dunia. Kota Salatiga juga memiliki strategi pembangunan dan pemerintahan yang selaras dengan kondisi globalisasi di mana jarak ruang dan batas waktu antara satu komunitas dengan komunitas dunia lainnya juga semakin tidak terbatas (borderless)

Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka menuju pencapaian pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, ketrampilan dan kesehatan;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM;
3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsive terhadap pelayanan public yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur;
4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum;

5. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. **“Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan public bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup”** Tahun 2027 difokuskan pada **“Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul”**

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM tahun 2027 yang selaras dengan RPJMD 2025-2029 dan Renstra Dinas Koperasi UKM Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

b. Tujuan:

Tujuan Dinas Koperasi UKM berkaitan dengan tugas dan fungsinya adalah **Meningkatkan kualitas koperasi dan daya saing UMKM guna menunjang perekonomian.**

c. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi UKM adalah

1. Meningkatnya Koperasi yang sehat dan cukup sehat,
2. Meningkatnya kualitas dan perkembangan usaha mikro dan kecil.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinkop UKM Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
1	Meningkatkan kualitas koperasi dan daya saing UMKM guna menunjang perekonomian		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Menunjukkan seberapa besar atau kecil peningkatan atau penurunan volume usaha koperasi. Metode pengukuran $(\text{Volume usaha koperasi tahun } n - \text{Volume usaha koperasi tahun } n-1) / \text{Volume usaha koperasi tahun } n-1 \times 100\%$	%	31,82	50	100
			Pertumbuhan omset usaha mikro kecil yang mengikuti pameran	Jumlah omset selama mengikuti pameran dibagi jumlah omset rata-rata perbulan $\times 100\%$	%	15	17	22
		Meningkatnya koperasi yang sehat dan cukup sehat	Persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat	Jumlah Koperasi yang sehat dan cukup sehat dibagi jumlah koperasi di Kota Salatiga $\times 100\%$	%	60,00	68,52	70,18
		Meningkatnya kualitas dan perkembangan UMKM.	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina dibagi jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Salatiga $\times 100\%$	%	47,11	51,7	54,5

3.2 Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pembukaan UUD 1945, para pendiri bangsa mengamanatkan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Artinya Pemerintah wajib mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pasal 33 ayat 4 amandemen UUD 1945 dijelaskan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 memiliki visi: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan nasional yang dikenal sebagai **Asta Cita**.

Sejalan dengan amanat RPJMN 2025-2029 dan arah pembangunan Indonesia Emas 2045, visi Kementerian Koperasi adalah **“Terwujudnya Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Nasional yang Kuat, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Pembangunan nasional dalam kerangka visi tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi, dengan memperkuat peran seluruh elemen bangsa, termasuk ekonomi kerakyatan. Koperasi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi semata, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan kelembagaan yang mampu menjawab tantangan ketimpangan, keterbatasan akses, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi.

Misi Presiden dan Wakil Presiden yang berkaitan dengan Koperasi yaitu ketercapaian pada Asta Cita, yaitu:

Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Asta Cita 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan ogromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Visi Kementerian Koperasi:

“Terwujudnya Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Nasional yang Kuat, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi Kementerian Koperasi

1. Mengembangkan tata kelola kelembagaan koperasi yang adaptif, akuntabel, dan sesuai prinsip demokrasi ekonomi;
2. Meningkatkan kapasitas usaha koperasi melalui penguatan sektor produksi, digitalisasi, dan jejaring usaha;
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia koperasi;
4. Mendorong budaya berkoperasi dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem koperasi
5. Memperkuat sistem pembiayaan dan perlindungan usaha koperasi yang menjamin keberlanjutan
6. Membangun ekonomi dari desa dan mendorong pemerataan

Tujuan Kementerian

1. Mewujudkan koperasi yang berdaya saing dengan tata kelola profesional dan produktif
2. Memperkuat reformasi birokrasi kementerian koperasi

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi

1. Meningkatnya kinerja usaha koperasi Indonesia
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam Perkoperasian
3. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Arah kebijakan nasional tersebut diperjelas dalam Renstra Kementerian Koperasi 2025–2029, dimana pemerintah pusat menetapkan empat intervensi kebijakan utama bagi sektor koperasi. Intervensi ini mencakup:

1. Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi serta penerapan digitalisasi, termasuk revitalisasi koperasi sektor produksi dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal.
2. Penguatan regulasi untuk memastikan koperasi beroperasi secara modern dan profesional.
3. Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi.
4. Penetapan Koperasi sebagai bagian dari proyek strategis nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Renstra tersebut juga menyelaraskan pelaksanaan tugas kementerian dengan prioritas nasional, khususnya pada Prioritas Nasional 3 (Peningkatan Produktivitas Ekonomi), Prioritas Nasional 5 (Ketahanan Ekonomi Nasional), dan Prioritas Nasional 6 (Pemerataan Pembangunan). Pada prioritas-prioritas ini, koperasi diarahkan menjadi motor penggerak hilirisasi, swasembada pangan, serta pemerataan pertumbuhan di tingkat daerah.

Visi Kementerian UMKM

Terwujudnya UMKM Naik Kelas Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi Kementerian UMKM

1. Memperkuat peran UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan
2. Mewujudkan Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik

Tujuan Kementerian UMKM

1. Terwujudnya Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan
2. Terbentuknya Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik (Good Governance)

Sasaran Kementerian UMKM

- 1. Meningkatnya UMKM Naik kelas
- 2. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berkualitas dan Akuntabel

Pada tahun 2025-2029 tahapan transformasi ekonomi adalah penguatan transformasi yang lebih difokuskan kepada hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja dengan kisaran pertumbuhan 5,6 – 6,1 persen. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan penguatan industrialisasi, modernisasi, dan digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas BUMN, UMKM dan Koperasi, serta tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional.

Tabel 3.3 Amanat Arah Kebijakan untuk UMKM
pada Transformasi Ekonomi

No	Tema Transformasi Ekonomi	Amanat Arah Kebijakan untuk Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
A	IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	
1	Industrialisasi	(Poin IX) : Penguatan rantai pasok di dalam negeri (Domestic Value Chain) dan partisipasi dalam (Global Value Chain), termasuk bagi industri skala kecil dan menengah (Point XVIII) : Penciptaan iklim usaha yang sehat untuk menghilangkan distorsi pasar dan mendorong pelaku usaha menjadi pelaku industrial yang efisien, efektif dan inovatif serta menciptakan iklim kemitraan yang mendorong proses industrialisasi antara lain melalui penyederhaan regulasi, penguatan kepastian hukum, penguatan persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha
2	Ekonomi dan Keuangan Syariah	(Poin III) : Penguatan ekosistem industri halal utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal
3	Pariwisata	(Poin IV) : Peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global
4	Ekonomi Kreatif	(Poin V) : Penumbuhan Start-up kreatif dan digital (Point VI) : peningkatan partisipasi pada rantai pasok global

5	Produktivitas UMKM dan Koperasi	(Poin I) : Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai industri domestik dan global termasuk melalui kemitraan dan pengawasannya (Poin II) : Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi antara lain melalui peningkatan literasi digital serta dukungan terhadap akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau (Poin III) : Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif (Poin IV) : Penguatan resilience dan kemampuan adaptasi usaha (Poin V) : Perluasan akses dan pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha, seperti penggunaan teknologi digital, pengembangan produk pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian dan penjaminan kredit (Poin VI) : Formalisasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja layak melalui pemberian insentif dan perluasan akses pasar, antara lain bagi usaha informal diberikan kemudahan untuk melakukan perizinan, sertifikasi, dan akses jaminan sosial bagi pekerjanya disertai dengan dukungan akses ke layanan keuangan dan pengembangan bisnis. (Poin VII) : Digitalisasi layanan pengembangan usaha dan proses formalisasi usaha (Poin XI) : Pengembangan dan penguatan yang diprioritaskan pada UMKM untuk dapat menciptakan Nilai tambah dan meningkatkan produktivitas
6	Produktivitas Tenaga Kerja	(Poin II) : Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, dan inklusif (Poin III) : Penetapan upah berbasis produktivitas dan penerapan upah minimum berkeadilan sebagai jaring pengaman yang berlaku bagi seluruh pekerja (Poin IV) : Percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses, dan dengan jangkauan luas, yang menjadi tulang punggung sistem pengembangan keahlian.
B TRANSFORMASI DIGITAL		
1.	Pengembangan sisi permintaan	(Poin III) : Peningkatan peran UMKM dalam <i>e-commerce</i> domestik dan global
C INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL		
1	Pusat Pertumbuhan	(Poin II) : Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada,

		termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai dengan potensi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif (Poin V) : Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global (Poin VI) : Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi dai pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi.
--	--	--

Sumber: UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kelembagaan Pemerintah selaku Pembina UMKM pada Transformasi Tata Kelola

No	Tema Transformasi Tata Kelola Pemerintah	Arah Kebijakan Kelembagaan Pemerintah selaku Pembina UMKM
1	Penataan Regulasi	(Poin I) : Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi, serta penguatan kajian urgensi regulasi dengan emnggunakan metode analisis dalam pembentukan regulasi
2	Proses Bisnis yang Adaptif	(Poin II) : Pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan shared outcomes
3	Layanan Publik	(Poin I) : Pengembangan portal dan/ atau platform pelayanan publik nasional; (Poin II) : Penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pusat-pusat (HUB) pelayanan publik
4	Transformasi Digital Pemerintahan	(Poin I) : Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional, percepatan penerapan satu data Indonesia, serta peningkatan keamanan siber

Sumber : UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Tabel 3.5 Amanat Intervensi Arah Kebijakan UMKM

No	Tema Transformasi UMKM	Amanat Arah Kebijakan untuk Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
A	Produktivitas UMKM dan Koperasi	
1	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	• Pengembangan koperasi sektor produksi utamanya dilakukan melalui pengembangan usaha koperasi yang difokuskan pada koperasi yang bergerak di sektor agromaritim, peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi • Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan reputasi koperasi, serta penguatan sistem pengawasan koperasi.
2	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif utamanya dilakukan melalui perluasan akses ke perizinan usaha, penyediaan skema dan fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, pelibatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, akselerasi digitalisasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi, serta pengembangan UMKM berkelanjutan
3	Pengembangan Kewirausahaan	Pengembangan kewirausahaan utamanya dilakukan melalui inkubasi usaha, penyediaan platform terintegrasi yang menghubungkan wirausaha dengan ekosistem usaha, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, pemutakhiran regulasi terkait pengembangan kewirausahaan nasional, serta disukung dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Sementara itu, Renstra Kementerian UMKM 2025 – 2029 mempertegas bahwa UMKM memegang peran sentral dalam struktur ekonomi nasional, namun masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti rendahnya adopsi teknologi, rendahnya produktivitas, lemahnya akses pembiayaan, dan belum optimalnya keterlibatan dalam rantai nilai nasional maupun global. Oleh karena itu, arah kebijakan Kementrian UMKM menekankan beberapa agenda transformasi utama, antara lain:

1. Peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, termasuk percepatan perizinan dan kemudahan usaha bagi pelaku UMKM.
2. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor-sektor prioritas, melalui penerapan teknologi dan inovasi produksi.
3. Peningkatan kualitas kebijakan kemudahan berusaha, terutama untuk mendorong peralihan usaha informal menjadi formal.
4. Penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi UMKM, sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional.
5. Pengembangan kapasitas SDM UMKM yang adaptif dan kompeten.
6. Penguatan kemitraan, perluasan pasar, dan integrasi ekonomi domestik serta global bagi pelaku UMKM.
7. Optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintah dalam fasilitasi, pendampingan, dan pemberdayaan UMKM.

Kebijakan nasional terkait UMKM dan Koperasi juga diperkuat oleh regulasi utama yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja, serta PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Regulasi tersebut memberikan landasan pemberdayaan UMKM secara komprehensif melalui penyediaan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pendampingan, kemitraan, serta penguatan kelembagaan UMKM yang didukung pusat dan daerah.

Dengan demikian, telaahan terhadap kebijakan nasional ini menjadi dasar bagi penentuan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2027 agar selaras dengan arah pembangunan jangka panjang, prioritas nasional, serta kebijakan sektoral kementerian. Selanjutnya, hasil telaahan tersebut dituangkan ke dalam Tabel 3.1 mengenai Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional sebagai bentuk keterpaduan perencanaan antara pusat dan daerah.

Tabel 3.6 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
1	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi.	– Pengembangan Koperasi Sektor Produksi – Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Reputasi koperasi, serta penguatan sistem pengawasan koperasi	Pengembangan koperasi difokuskan pada koperasi yang bergerak di sektor agromaritim, peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
2	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif (KUP).	– Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif – Penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	Perluasan akses ke perizinan usaha, penyediaan skema dan fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan SDM berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, akselerasi digitalisasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi, serta pengembangan UMKM berkelanjutan
3	Ketahanan Pangan Nasional.	– Melalui koperasi penyediaan bahan pokok untuk makan bergizi gratis – Penguatan produksi beras berbasis koperasi – Peningkatan produksi susu berbasis koperasi – Distribusi pupuk bersubsidi melalui koperasi – Pengoptimalan pemanfaatan seluruh hasil produksi pangan yang ada	Koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi penyalur utama bahan pokok, beras, susu, dan pupuk untuk mendukung ketahanan pangan.
4	Hilirisasi Industri	- Penguatan kemitraan UMKM mendorong masuk ke dalam rantai pasok industri - Penguatan produksi tekstil oleh koperasi - Produksi energi biomassa oleh Koperasi	Koperasi sebagai pelaku utama hilirisasi industri berbasis komunitas : tekstil, biomassa untuk mendukung ondustrialisasi lokal dan nasional
5	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	– Fasilitasi pendirian bank koperasi – Sarjana penggerak koperasi – Pembebasan Kredit Usaha Tani (KUT)- Hapus Buku dan Hapus	Semua inovasi kelembagaan, digitalisasi, pengembangan SDM dan akses pembiayaan diarahkan untuk penguatan koperasi

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
		Tagih – 7 Unit Usaha KKMP (dari substansi KKMP)	kelurahan sebagai pusat ekonomi lokal melalui koperasi kelurahan merah putih
6	Industri Kreatif	–Penguatan produksi tekstil oleh koperasi –Pengembangan koperasi ojek online –Pengembangan koperasi sektor digital dan konten kreatif	Koperasi didorong menjadi wadah kolaborasi dan integrasi pelaku industri kreatif termasuk tekstil, fesyen, digital, dan ekonomi dengan pengembangan koperasi sektor digital memperkuat ekosistem usaha kreatif, memperluas akses pasar, mendorong adopsi teknologi, serta mendukung perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual anggota di bidang ekonomi kreatif

Tabel 3.7 Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Prioritas Nasional 3	Pengembangan koperasi sektor produksi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Prioritas Nasional 6	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Perencanaan dan Pengembangan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menyebutkan tujuan pembangunan Koperasi dan UKM adalah :

1. Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB.

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Koperasi dan UKM di Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki Koperasi dan UKM Jawa Tengah

2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

Tujuan tersebut sebagai penunjang kesekretariatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola organisasi yang lebih baik.

Sedangkan sasaran pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatnya Tingkat Kesehatan Koperasi Jawa Tengah

Sasaran ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengukur peningkatan jumlah koperasi sehat di Jawa Tengah

2. Meningkatnya Omzet Koperasi dan UMKM Jawa Tengah

Sasaran ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengukur pertumbuhan omzet Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.

3. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah

Sasaran ini menggambarkan implementasi manajemen risiko di lingkungan Perangkat Daerah

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, yang didapatkan dari survei kepuasan masyarakat, Keselarasan Indikator Tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.

Arah kebijakan Provinsi Jawa tengah Tahun 2027 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 aalah “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. Untuk mengimplementasikan arah

kebijakan ini, Kota Salatiga ikut mendukung kinerja Provinsi dengan kinerja urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

Jumlah Produk Tersertifikasi halal

Tabel 3.8 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Program	Aktivitas
1	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI dan P-IRT secara gratis	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM
2	Penguatan dan Pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pelatihan bagi pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Inkubator koperasi bagi KKMP
			Promosi produk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pameran dan bazaar

Tabel 3.9 Keselarasan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

Provinsi Jawa Tengah		Target Tahun 2027	Kota Salatiga		Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP		Arah Pembangunan	IUP	
CJ04. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		Aspek Daya Saing Daerah		
	b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,85		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,25
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	2,34		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,90

3. Telaah terhadap Kebijakan Kota Salatiga

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menetapkan program dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota yang merupakan program kegiatan yang disusun pada OPD mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan yang disusun pada level kota tahun berkenaan.

Tabel 3.11 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas dan Kota

No	Prioritas Kota	Program	Aktivitas
1	PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarya) Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		Program Pengembangan UMKM	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2	PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarya)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dinkop UKM) merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah).

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain:

- a. Dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil analisis berbagai aspek, isu strategis pembangunan daerah yang ada kaitannya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:
 - Penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan
 - Kualitas Hidup dan daya saing sumber daya manusia
 - Penurunan kesenjangan gender, dan peningkatan perlindungan anak dan Perempuan serta pelayanan lansia
 - Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing
 - Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
 - Kualitas tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif
- b. Arah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga tahun 2027 yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029, adalah pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM unggul juga diarahkan pada pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur, yang berkaitan dengan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah difokuskan pada meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup, diprioritaskan pada:
 - Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara

massif;

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/ kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor;
- Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas Kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan system pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
- Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat penyesuaian pada sub kegiatan yang dilaksanakan, target kinerja, dan jumlah anggaran. Pada renstra 2025-2029, tahun 2027 Dinas Koperasi direncanakan akan melaksanakan 7 program, 13 kegiatan, dan 32 sub kegiatan. Anggaran tahun 2027 pada renstra 2025-2029, sebesar Rp8.824.000.000,-. Namun Program, kegiatan, dan sub kegiatan secara keseluruhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 adanya kebijakan dan penyesuaian kebutuhan menyebabkan Dinas Koperasi UKM melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan program dan kegiatan. Secara total, pada Renja 2027 ini, untuk kebutuhan program, kegiatan, sub kegiatan, diperlukan anggaran sebesar Rp5.707.219.484,-. Sumber dana yang diharapkan berasal dari APBD Kota Salatiga.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan/atau realisasi APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2025 sampai triwulan 3, sebagai berikut:

- a. ada 2 program/3 kegiatan/3 sub kegiatan, yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan, yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Faktor-faktor atas tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
 - 1) Perencanaan, monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang baik.

- 2) Komitmen dan kerja sama yang baik oleh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, maupun komitmen dan kerja sama dengan lintas sektoral dan para pemangku.
 - 3) Dukungan anggaran yang baik.
- d. Terkait dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut berimplikasi positif terhadap target atas program.
 - e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil atas faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu:
 - 1) Menjaga komitmen melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi berkala yang baik berdasarkan ketentuan serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan rasionalitas atas kemampuan pendanaan dan prioritas kebutuhan yang telah ditetapkan.
 - 2) Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah guna menyesuaikan dengan tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis, sehingga dapat berkarya, berkreasi, dan berinovasi dengan lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga;
 - 3) Meningkatkan kualitas SPIP serta meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana utama maupun pendukung untuk karya, kinerja, dan pelayanan yang lebih baik lagi.

Secara lengkap, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkop UKM tahun anggaran 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2026) sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Salatiga

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	17				Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah									
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	100	100	85,04	0	100	200	2
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			83,42	86,66				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah			68.95					
2	17	01	2.01		Keg Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas	4	4	4	3	0,75	4	11	2,75
2	17	01	2.01	0006	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	3	0,75	4	11	2,75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.01	0006	Sub Keg Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	1	0	0	0	0	1	1	1
2	17	01	2.01	0006	Sub Keg Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang telah di Kumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	0	0	0	0	1	1	1
2	17	01	2.01	0006	Sub Keg Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	1	0	0	0	0	1	1	1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perangkat Daerah	yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Keuangan Dinas	100	100	100	83,95	0,8395	100	283,95	2,84
2	17	01	2.02	0001	Sub keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	23	23	1,00	23	69	3,00
2	17	01	2.02	0002	Sub Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	9	0,75	12	33	2,75
2	17	01	2.03		Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase pelaksanaan	100	100	100	35	0,35	100	235	2,35

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perangkat Daerah	administrasi barang milik daerah								
2	17	01	2.03	0001	Sub Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	1	1	0	0	2	3	1,5
2	17	01	2.04		Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	72,4	0,724	100	272,40	2,72
2	17	01	2.04	0001	Sub keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.04	0002	Sub keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	17	01	2.04	0003	Sub keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	3	3	1,00	1	5	5
2	17	01	2.04	0004	Sub keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	17	01	2.04	0005	Sub keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	17	01	2.04	0006	Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	1	1	1	1	1	1	3	3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kunjungan Tamu								
2	17	01	2.04	0007	Sub keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
2	17	01	2.04	0008	Sub Keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
2	17	01	2.05		Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100	6	6	1,00	100	206	2,06
2	17	01	2.05	0001	Sub keg Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	10	4	4	1	22	36	3,6
2	17	01	2.05	0002	Sub keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	10	12	20	1,67	12	42	4,2

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.06		Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	77,19	0,77	12	189,19	1,89
2	17	01	2.06	0001	Sub keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	1,00	1	3	3
2	17	01	2.06	0002	Sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	0	0,00	1	2	2
2	17	01	2.06	0003	Sub keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	1	0	0,00	1	1	1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.06	0004	Sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	0	0,00	1	2	2
2	17	01	2.07		Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	32	33	100	79,88	0,80	33	145,88	4,56
2	17	01	2.07	0001	Sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	4	4	1,00	4	12	3
2	17	01	2.07	0002	Sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	1	1	1	1	1,00	1	3	3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
2	17	01	2.07	0003	Sub keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	15	15	1,00	25	65	2,6
2	17	01	2.07	0004	Sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	1	0	0,00	1	2	2
2	17	01	2.07	0005	Sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	2	1	0	0,00	1	3	3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Dipelihara/ Direhabilitasi								
2	17	01	2.07	0006	Sub keg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	0	1	1	1,00	1	2	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	71,97	62,5	65,00	61,70	0,95	71,79	195,99	2,72
2	17	03	2.01		Keg Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan	50	50	50	48	0,96	50	148	2,96

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Koperasi								
2	17	03	2.01	0001	Sub keg Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50	50	50	48	0,96	50	148	2,96
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	77,41	71,58	72,00	54,74	0,76	74,43	200,75	2,59
2	17	04	2.01		Keg Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi	54	50	50	48	0,96	53	151	2,80

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	04	2.01	0001	Sub keg Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	54	50	50	48	0,96	53	151	2,80
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	53,06	57,89	52,00	61,67	1,19	52,58	172,14	3,24
2	17	05	2.01		Keg Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	100	305	290	0,95	100	490	4,9
2	17	05	2.01	0001	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan	Jumlah SDM yang Memahami	100	100	305	290	0,95	100	490	4,9

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pengetahuan Perkoperasian								
2	17	06	2.01		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	32,42	53,98	55	68,57	1,25	62,18	184,73	5,70
2	17	06	2.01		Keg Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	12	10	24	23	0,96	12	45	3,75
2	17	06	2.01	0001	Sub keg Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses	12	10	10	10	1,00	12	32	2,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	48,64	40,88	45	50,35	1,12	47,89	139,12	2,86
2	17	07	2.01		Keg Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro	310	252	65	60	0,92	260	572	1,85

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan								
2	17	07	2.01	0001	Sub keg Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60	52	52	60	1,15	60	172	2,87
2	17	07	2.01	0002	Sub Keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	250	200	150	150	1,00	200	550	2,20
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	25,93	24,8	23,00	25,93	1,13	25,55	76,28	2,94

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program kegiatan dan Sub Kegiatan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	08	2.01		Keg Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro	390	318	100	200	2,00	390	908	2,33
2	17	08	2.01	0001	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	390	318	100	200	2,00	390	908	2,33

Tabel 4.2 Review terhadap RENSTRA OPD tahun 2025 – 2029 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	4.836.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	4.084.608.484	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,1	4.836.500.000			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,1	4.084.608.484	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,2	4.836.500.000			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,2	4.084.608.484	
2	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas	4	51.000.000	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas	4	9.000.000	
3	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4	11.000	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	4	9.000.000	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
4	Sub Keg Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah	1	10.000.000						
5	Sub Keg Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah di Kumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	10.000.000						
6	Sub Keg Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Salatiga	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	1	20.000.000						

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
7	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Pelaksanaan Keuangan Dinas	100	3.283.317.168	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Pelaksanaan Keuangan Dinas	100	3.313.509.340	
8	Sub keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	3.133.317.168	Sub keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	3.172.298.854	
9	Sub keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	150.000.000	Sub keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	150.210.486	
10	Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100	46.000	Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100	35.000.000	
11	Sub Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	46.000	Sub Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	35.000.000	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	319.000.000	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	301.600.000	
13	Sub keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9.000	Sub keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000	
14	Sub keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	26.000	Sub keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	35.000.000	
15	Sub keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	41.000	Sub keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	30.000.000	
16	Sub keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	30.000	Sub keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	13.000.000	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Sub keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.000	Sub keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.600.000	
18	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	15.000	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	15.000.000	
19	Sub keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	175.000	Sub keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	190.000.000	
20	Sub Keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	20.000	Sub Keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	5.000.000	
24	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	98.800	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	96.500.000	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Sub keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.000	Sub keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.500.000	
26	Sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	25.000	Sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	20.000.000	
28	Sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	50.000	Sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	73.000.000	
29	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	32	291.000	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	32	333.999.144	
30	Sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	4	150.000	Sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	4	140.000.000	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
31	Sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	13.000	Sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	12.000.000	
32	Sub keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	28.000	Sub keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	20.000.000	
33	Sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1	50.000	Sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	66.400.000	
34	Sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1	50.000	Sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1	95.599.144	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lainnya		Direhabilitasi			Lainnya		Direhabilitasi			
36	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Salatiga	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	71,97	135.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Salatiga	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	71,97	111.368.800	
37	Keg Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	50	135.000.000	Keg Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	50	111.368.800	
38	Sub keg Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50	135.000.000	Sub keg Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50	111.368.800	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Salatiga	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	77,41	135.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Salatiga	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	77,41	75.000.000	
40	Keg Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi	54	135.000.000	Keg Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi	54	75.000.000	
41	Sub keg Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	54	135.000.000	Sub keg Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	54	75.000.000	
42	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Salatiga	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	53,06	310.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Salatiga	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	53,06	71.242.200	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
43	Keg Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	310.000.000	Keg Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	71.242.200	
44	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Salatiga	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	310.000.000	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Salatiga	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	71.2412.200	
45	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Salatiga	Persentase Koperasi Aktif	62,42	310.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Salatiga	Persentase Koperasi Aktif	62,42	280.000.000	
46	Keg Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	12	310.000.000	Keg Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	12	280.000.000	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
47	Sub keg Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Salatiga	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12	310.000.000	Sub keg Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Salatiga	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12	280.000.000	
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Salatiga	Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	48,64	1.597.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Salatiga	Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	48,64	621.000.000	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
49	Keg Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Salatiga	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan	310	1.597.500	Keg Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Salatiga	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan	310		
50	Sub keg Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Salatiga	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60	200.000	Sub Keg Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pelaku Usaha	Salatiga	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan		471.000.000	
51	Sub Keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Salatiga	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	250	1.397.500	Sub keg Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Salatiga	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60	150.000.000	
52	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Salatiga	Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	25,93	1.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Salatiga	Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	25,93	450.000.000	

No	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
53	Keg Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Salatiga	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro	390	1.500.000	Keg Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Salatiga	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro	390	450.000.000	
54	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Salatiga	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	390	1.500.000	Sub keg Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar dalam Negeri	Salatiga	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	390	450.000.000	

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2027 dengan lokasi penyebaran adalah di wilayah Kota Salatiga, sebanyak 7 program dengan 12 kegiatan, dan 27 sub kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program yang berindikator Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (target 100%), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 86,1. Indikator nilai SAKIP dengan target 69,2 ini terdiri dari 6 kegiatan, dengan 20 subkegiatan, yang terinci sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan subkegiatan
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu; dan
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota dengan sub kegiatan:

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan:
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha
 - b) Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM
- g. Program Pengembangan Umkm
 - 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan:
 - Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar dalam Negeri

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2027 sebesar Rp5.707.219.484,- yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 4.3
 Rumusan Rencana Program, Jumlah Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2027

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.084.608.484,-
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,-
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000,-
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,313,509,340,-
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,172,298,854,-
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150,210,486,-
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.000.000,-
2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35,000,000,-
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301,600,000,-
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000,-
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35,000,000,-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000,-
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,000,000,-
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000,-
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000,-
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190,000,000,-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000,-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,500,000
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000,-
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,000,000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73,000,000,-
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333,999,144,-
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140,000,000,-
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,000,000,-
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000,-
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66,400,000,-
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95,599,144,-
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	111,368,800
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	111,368,800
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	75,000,000
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75,000,000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	71,242,200,-
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten/Kota	71,242,200,-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	71,242,200,-
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	280,000,000,-
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	280,000,000,-
2.17.06.2.01.0005	Sub keg Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	280,000,000,-
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	621,000,000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
2.17.07.2.01.0003	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	471,000,000,-
2.17.07.2.01.0004	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	150,000,000,-
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	450,000,000
2.17.8.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
2.17.8.2.01.0006	Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	450,000,000
J U M L A H		5.707.219.484,-

4.2 Tematik

Tabel 3.12 Dukungan Program dan Kegiatan terhadap Kebijakan Tematik

No	Jenis Kebijakan Tematik	Program	Aktivitas
1	Pengentasan kemiskinan	Percepatan penurunan tingkat kemiskinan	Penguatan program Pemberdayaan Ekonomi berbasis komunitas dan UMKM

Dalam rangka mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan, Dinkop UKM berperan dalam aktivitas penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM sudah terakomodir dalam Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM dengan Pagu sebesar Rp.1.071.000.000,- berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun 2027

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja perangkat daerah bersama kinerja kepala daerah berkontribusi dalam penghitungan indikator kinerja utama daerah yang merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memperhatikan target indikator utama pembangunan pada RPJPD 2025-2045 sebagai baseline tahun 2025 yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Penetapan target juga berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176ISJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan dinamika pembahasan terkait Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan Pemerintah Pusat.

5.1 Indikator Kinerja Utama Dinkop UKM

Ukuran pencapaian kinerja perangkat daerah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan target indikator kinerja didasarkan pada berbagai pertimbangan kunci untuk memastikan relevansi, kelayakan. Meliputi keselarasan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijadikan sebagai acuan utama, analisis kinerja tahun sebelumnya untuk memahami target dan pencapaian, serta evaluasi ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan SDM. Selain itu, target juga harus memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi, mempertimbangkan partisipasi publik dan evaluasi kinerja tahunan untuk perbaikan berkelanjutan.

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menunjukkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Slatiga Tahun 2025-2029.

Tabel 5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2025
(berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027
1	Presentase koperasi yang sehat dan cukup sehat	(Jumlah koperasi yang sehat dan cukup sehat)/(Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya)	%	65,38	66,67	67,92	68,52
2	Presentase usaha mikro dan kecil yang dibina	(Jumlah unit usaha yang dibina)/(Jumlah seluruh UMKM) x 100	%	49,8	47,2	50,8	51,7

Pada tahun 2025, target persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat sebesar 65,38% dan realisasi sebesar 66,67%. Ini berarti bila dibandingkan dengan target, pencapaian realisasi sebesar 101,97%.

Upaya untuk meningkatkan persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat telah dilakukan melalui 4 (empat) program pendukung, yaitu:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Didalam keempat program di atas, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi yang ada di Salatiga;
2. Berbagai macam bimtek dan pelatihan bagi SDM koperasi, diantaranya adalah bimtek penyusunan produk hukum koperasi, bimtek analisa kredit bagi KSP/USP, bimtek sistem informasi manajemen resiko, bimtek pemeriksaan kesehatan internal koperasi, pelatihan akuntansi koperasi, pelatihan penyusunan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelatihan AMT, pelatihan pajak koperasi, digitalisasi koperasi, pelatihan manajemen koperasi, serta pelatihan usaha bagi anggota koperasi.
3. Peringatan Hari Koperasi Tingkat Kota Salatiga.

Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina pada tahun 2025 dapat dicapai sebesar 47,2% dari target sebesar 49,8%. Ini berarti, bila dibandingkan dengan target, pencapaian realisasi sebesar 94,8%. Terdapat usaha mikro sebanyak 23.590 unit usaha dari jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 23.650 unit usaha.

Upaya untuk mencapai target persentase usaha mikro dan kecil dilakukan melalui 2 (dua) program pendukung, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
2. Program Pengembangan UMKM

Di dalam dua program di atas, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fasilitasi halal bagi UMKM dan badan hukum bagi kelompok UMKM
2. Menyelenggarakan pameran dalam kota dan mengikuti berbagai macam pameran yang diselenggarakan baik di luar kota.
3. Penyediaan shelter bagi UMKM
4. Berbagai macam pelatihan dan fasilitasi yaitu pelatihan boga, pelatihan packaging, pelatihan UMKM naik kelas, pelatihan digital marketing, pelatihan kewirausahaan, audiensi dengan UMKM, kurasi produk UMKM, link and match antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha, dan pembuatan video UKM dalam rangka promosi produk UMKM.

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga merupakan alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Tabel 5.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2025
(berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya, volume usaha, atau aset)/(Jumlah koperasi yang aktif) x 100	%	71,78	71,88	74,43	77,41
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	(Jumlah unit mikro yang menjadi wirausaha)/(Jumlah t) x 100	%	100	48,8	100	100

Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah juga menetapkan Indikator Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang di tetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara urusan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 5.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga

No	Indikator	SPM/standar nasional	Jenis Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026 (sd Triwulan 2)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Presentase koperasi yang sehat dan cukup sehat	(Jumlah koperasi yang sehat dan sehat)/(Jumlah koiperasi yang dinilai kesehatannya)	IKU	65,38	67,92	68,52	69,09	66,67	33,33	101,97	49,07	
2	Presentase usaha mikro dan kecil yang dibina	(Jumlah unit usaha yang dibina)/(Jumlah seluruh UMKM) x 100	IKU	49,8	50,8	51,7	52,6	47,2	48,5	94,8	95,47	
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya, volume usaha, atau aset)/(Jumlah koiperasi yang aktif) x 100	IKK	71,78	74,43	77,41	80,51	71,88	21,14	100,13	28,40	
4	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	(Jumlah unit mikro yang menjadi wirausaha)/(Jumlah total UKM) x 100	IKK	100	100	100	100	48,8	48,8	48,8	48,8	

BAB VI PENUTUP

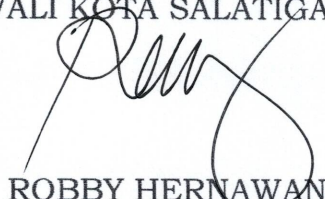
Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian Tahun 2025 serta kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang efektif dan optimal untuk pencapaian target kinerja. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan sub kegiatan akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2027. Selain itu, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diselaraskan dengan Renstra Dinkop 2025-2029, RKPD tahun 2027 dan mendukung pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

Agar pelaksanaan Renja Dinkop UKM tahun 2027 dapat berjalan dengan baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Renja menjadi pedoman dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Renja akan menjadi instrumen dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas dan pokok fungsi;
- c. Seluruh pengelola kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah agar melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan dengan mengacu pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja.

Keberhasilan pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2027 memerlukan kerja sama seluruh personil dan dukungan dari para pemangku kepentingan yang terkait. Seiring dengan perkembangan yang ada, Rancangan Rencana Kerja Tahun 2027 jika diperlukan akan dilakukan penyesuaian yang akan dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2027.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN